



개 회 사

현병철 (국가인권위원회 위원장)

안녕하십니까?

대한민국 국가인권위원회 위원장 현병철입니다.

먼저 북한인권 개선을 위한 본 행사의 취지에 공감하고 우리 위원회와 공동으로 오늘 행사를 준비해 주신 인도네시아 과학원, 인도네시아 인권위원회, 아세안정부간 인권위원회 인도네시아대표부 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

아울러 오늘 이 자리에 소중한 시간을 내어 참석해주신 인도네시아 정부 및 학계 관계자 여러분, 시민단체 활동가, 그리고 각국의 외교관 여러분께도 감사의 인사를 드립니다.

그리고 다음 주 워싱턴에서 개최될 COI조사보고서 발표 1주년 행사 및 3월 유엔 인권이사회 등 바쁜 일정속에서도 오늘 기조연설을 해주실 마르주끼 다루스만 유엔 북한인권특별보고관님께 깊은 감사를 드립니다.

내외귀빈 여러분!

북한의 심각한 인권상황에 대해서는 이제 더 이상 따로 언급할 필요가 없을 만큼 전 세계가 인식을 공유하고 있다고 생각합니다. 따라서 이제는 북한인권의 실질적 개선을 위한 해결방안을 찾기 위해 우리 모두가 고민해야 할 때이며 오늘 우리가 여기에 모인 이유입니다.

저는 북한인권을 개선하기 위해서는 인권에 대한 인식의 차원과 구체적 행동의 차원을 나누어 접근하고 논의할 필요가 있다고 생각합니다.

먼저 인권에 대한 인식의 차원입니다. 인권의 개념과 기준은 지금까지 우리 인류가 역사를 통해 축적하고 합의해온 보편적 원칙에 따라야 합니다. 나라마다 고유한 역사와 문화, 정치적·사회적 특수성이 있지만 이를 이유로 인권의 개념과 기준을 나라마다 각각 다르게 정의하고 적용한다면 유엔이 추구하는 인류 보편적 가치로서의

인권은 자리매김하기 힘들 것입니다.

저는 지난해 가을 북한의 조선인권연구협회가 발간한 보고서를 통해 드러난 북한의 인권개념과 기준이 국제사회의 그것과 매우 다르다는 것을 확인하였습니다. 국가는 국민의 인권을 보장할 의무가 있지만 때로는 국민의 인권을 탄압할 위험성도 갖고 있고, 사회 다수집단에 의해서 소수집단의 인권이 침해되기 쉽다는 사실을 인류 역사를 통해 잘 알고 계실 것입니다. 그렇기에 인권은 항상 국가 권력과 분리하여 생각되어야 하고 다수보다는 소수, 집단보다는 개인에게 초점이 맞춰져야 합니다.

따라서 저는 북한이 이제부터라도 국제사회와 활발한 인권대화와 교류를 통해 인권개념과 기준에 대해 국제사회와 공감대를 형성하기를 희망합니다. 저는 이것이 북한인권 개선의 진정한 출발점이 될 것이라고 생각합니다.

다음으로 북한인권 개선을 위한 구체적 행동 차원입니다. 이것은 대상과 주제에 따라 매우 다양한 방법들이 논의 될 수 있을 것입니다만 저는 오늘 북한, 인도네시아, 그리고 아시아라는 국가 또는 지역단위에서 접근방법을 제안하고자 합니다.

첫째, 북한인권 개선의 근본적 주체는 북한당국이라는 점입니다. 북한은 북한 주민들에 대한 인권침해의 당사자이지만 동시에 북한 당국이 북한인권의 개선 주체가 될 때 근본적이고 실질적인 북한인권 개선을 가져올 수 있습니다. 북한 스스로가 변화하지 않는다면 북한주민들의 인권 개선에는 분명한 한계가 있을 수밖에 없으며, 이런 점에서 저는 남과 북이 주민들의 인권과 복지향상을 위해 상호 협력과 경쟁을 해 나가길 희망합니다. 우리 위원회는 독립적인 국가인권기구로서 북한과 인권 대화 및 협력을 해 나가길 희망합니다. 남북한 간 인권격차를 줄여나가는 것은 통일 후 남북 간 원만한 사회통합을 위해서도 필수적입니다.

둘째, 아세안 지역의 중심국가로 민주주의와 인권을 중시하면서 경제성장을 동시에 이루어 가고 있는 인도네시아가 북한인권 개선에 있어 매우 중요한 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 인도네시아는 남북한 동시 수교국으로 북한과의 인권대화 및 남북한 간 인권대화의 조정자 역할을 통해 북한인권 개선에 기여할 수 있을 것으로 생각합니다. 또한 동남아시아 지역 탈북자 인권문제를 아세안의 의제로 채택 되도록 제안할 수도 있을 것입니다.

셋째, 북한인권 개선을 위한 보다 포괄적인 지역적 접근 방식의 하나로 아시아 지역 차원의 인권기구 설립 또는 협의체 구성을 제안하고자 합니다. 개별 국가의 인권 문제에 대해 해당 국가 스스로 또는 양자 관계를 통한 해결에는 많은 한계가 있으

므로 지역단위의 다자간 협력을 통한 해결이 훨씬 효과적일 것입니다. 현재 아시아 지역에는 아시아태평양지역 국가인권기구 모임인 아시아 태평양 포럼(Asia-Pacific Forum, APF)이 있고, 10개 아세안회원국으로 구성된 아세안정부간인권위원회(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR)가 구성되어 있지만 아시아 지역 단위의 인권기구나 협의체는 아직 없는 상황입니다. 중국, 태국, 라오스, 미얀마 등의 탈북자 인권문제 뿐만 아니라 난민, 이주노동자 인권, 인신매매 등의 인권 문제는 국가 간 또는 지역단위에서 발생하고 해결되어야 하는 문제이므로 동남아시아뿐만 아니라 한국, 북한, 일본, 중국 등을 모두 포괄하는 아시아지역 차원의 인권기구 설립 또는 협의체 설립이 필요하다고 생각합니다. 세계경제에서 중요한 비중을 차지하고 있는 중국, 한국, 일본 등 동북아시아 국가들이 모두 포함된 아시아 지역 차원의 인권기구가 설립된다면 아시아지역 뿐만 아니라 지구차원의 인권향상에 크게 기여할 것이라 생각하며, 오늘 토론회 두 번째 세션에서 이와 관련된 구체적이고 생산적인 논의가 이루어지길 기대합니다.

내외 귀빈 여러분!

2014년은 COI보고서 발표 및 유엔인권이사회 채택, 유엔총회의 북한인권결의안 채택 및 북한인권 상황의 유엔안전보장이사회 회부와 정식 의제 채택 등 북한인권 문제에 있어 국제적으로 그 어느 해보다 많은 진전이 있었습니다. 또한 금년 3월에는 서울에 유엔북한인권현장사무소 개소가 예정되어 있습니다. 저는 이러한 국제사회의 노력과 일련의 진전된 과정들이 북한 주민들에게 희망과 위로의 메시지가 되고 언젠가는 북한주민의 인권 개선으로 이어질 것을 확신합니다. 그러나 아직은 북한주민들의 인권은 너무도 단단하고 두꺼운 얼음 속에 갇혀있습니다. 오늘 이 자리에 서있는 우리 모두의 관심과 노력이 그 얼음을 조금씩 녹여나갈 것입니다.

다시 한 번 오늘 심포지엄이 개최될 수 있도록 협조해 주신 관계자 여러분들과 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 깊은 감사를 드리며 앞으로도 북한인권 개선을 위해 우리 위원회와 함께 해주시기를 희망합니다.

감사합니다.

2015. 2. 10.

국가인권위원회

위원장 **현 병 철**



Pidato Pembukaan Acara

Hyun, Byung-Chul
(Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)

Selamat pagi/siang/sore?

Saya Hyun Byung Chul ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pertama tama saya mengucapkan terimakasih kepada Komisi Hak Asasi Manusia Korea Selatan dan sponsor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Perwakilan Indonesia Komisi Antar-Pemerintahan ASEAN Hak Asasi Manusia yang telah menyelenggarakan acara ini dan telah bersimpati untuk memperbaiki Hak Asasi Manusia Korea Utara.

Tambahan lagi saya berterimakasih kepada yang sudah berpartisipasi untuk hadir hari ini para pejabat pemerintah Indonesia dan Akademis, Aktivis LSM, juga para diplomat dari seluruh negara.

Dan saya sangat berterimakasih kepada Pelapor Khusus PBB HAM Korea Utara bapak Marzuki Darusman yang akan membawa pidato utama hari ini meskipun beliau sibuk karena ada acara ulang tahun pertama perilisan laporan penelitian COI yang diselenggarakan di Washington minggu depan dan pertemuan dengan Dewan Direktur HAM PBB bulan Maret

Para hadirin!

Untuk situasi kejahatan Hak Asai Manusia Korea Utara tidak perlu lagi kita bicarakan karena seluruh dunia sudah mengetahuinya. Oleh karena alasan itu kita berkumpul disini untuk mencari solusi praktis memperbaiki HAM Korea Utara.

Untuk meningkatkan HAM Korea Utara saya pikir kita perlu pendekatan dan

pembahasan untuk Dimensi Kesadaran HAM dan Dimensi Tindakan Spesifik.

Pertama dimensi kesadaran tentang HAM. Konsep dan dasar HAM harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah disepakati dan dikumpulkan oleh umat manusia lewat sejarah. Setiap negara mempunyai sejarah dan budaya yang unik, kekhususan politik dan sosial, tetapi kalau dengan alasan ini definisi konsep dan dasar HAM diterapkan dengan berbeda di setiap negara, HAM mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat sebagai nilai universal umat manusia sebagaimana yang diharapkan oleh PBB

Musim gugur tahun lalu saya menegaskan bahwa sangat berbeda konsep dan dasar HAM Korea Utara dengan masyarakat Internasional yang diungkapkan melalui laporan Asosiasi Studi HAM Korea Utara. Negara wajib menjamin HAM warga negara, tetapi kadang kadang juga memiliki risiko penganiayaan terhadap HAM rakyat dan kemungkinan sudah tahu bahwa HAM sekelompok minoritas muda dilanggar oleh sekelompok mayoritas sosial. Oleh karena itu HAM selalu dipertimbangkan secara terpisah dari kekuasaan negara dan fokusnya harus minoritas dari pada mayoritas, Individu dari pada kelompok

Karena itu saya berharap mulai sekarang Korea Utara membentuk konsensus dengan masyarakat Internasional tentang konsep dan dasar HAM melalui dialog yang aktif dan pertukaran dengan masyarakat Internasional. Saya pikir ini akan menjadi titik awal yang benar untuk memperbaiki HAM Korea Utara.

Selanjutnya dimensi Tindakan Spesifik untuk memperbaiki HAM Korea Utara. Hal Ini akan dibahas dengan cara yang sangat berbeda, tergantung pada subjek dan topik, tetapi hari ini saya ingin mengusulkan pendekatan dari Korea Utara Indonesia, negara atau unit lokal asia.

Pertama, Inti dasar memperbaiki HAM Korea Utara adalah pemerintahan Korea Utara. Pemerintah Korea Utara adalah pelanggar HAM para warga Korea Utara, tetapi pada saat yang sama meningkatkan HAM Korea Utara yang medasar dan praktis kalau pemerinta Korea Utara menjadi Inti utama perbaikan HAM Korea Utara. Jikalau Korea Utara sendiri tidak mau berubah, jelas ada keterbatasan didalam memperbaiki HAM KoreaUtara, dalam hal ini saya berharap Selatan dan Utara bekerja sama dan berkompetisi untuk meningkatkan HAM dan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan mengurangi perbedahan antara kedua Negara Korea dan juga sangat penting untuk mempersatukan kehidupan sosial yang harmonis setelah penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan.

Kedua, Indonesia dengan penekanan demokrasi dan HAM sekaligus berkembang perekonomian di tengah kawasan ASEAN, akan menjadi peran yang sangat penting dalam memperbaiki HAM Korea Utara. Indonesia dianggap mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan HAM Korea Utara melalui koordinator dialog HAM diantara Korea Utara dan Korea selatan dan dialog HAM Korea Utara sebagai negara persahabatan Korea Utara dan Selatan.

Selain itu dimungkinkan untuk menunjukkan supaya dipilih menjadi agenda ASEAN dalam bahasan masalah HAM pengungsi Korea Utara kawasan ASIA TENGGARA.

Ketiga, saya ingin mengusulkan untuk memperbaiki HAM Korea Utara dengan cara pendekatan regional yang komprehensif dengan mendirikan lembaga HAM tingkat kawasan ASIA atau pembentukan consultative organization. Karena ada keterbatasan jika diselesaikan melalui negara sendiri atau hubungan nasional masalah HAM masing masing negara, maka akan lebih efektif diselesaikan melalui kerja sama multilateral regional. Saat ini di kawasan ASIA ada Asia-Pacific Forum, APF yang pertemuan lembaga HAM kawasan ASIA Pasific, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR yang membentuk komisi ASEAN HAM antar-pemerintah ASEAN dengan terdiri 10 negara komisi ASEAN. Namun masih belum ada lembaga HAM atau consultative organization unit kawasan ASIA. Masalah HAM Bukan hanya masalah HAM pelarian China, Thailand, Laos, Myanmar, serta pengungsi, HAM pekerja migran, perdagangan budak karena merupakan masalah yang terjadi dan harus diselesaikan di tingkat nasional atau regional, perlu didirikan lembaga HAM atau consultative organization tingkat kawasan ASIA bukan hanya ASIA Tenggara tapi meliputi Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, China.

Kalau membentuk lembaga HAM di tingkat ASIA yang melibatkan negara-negara ASIA Timur seperti China, Korea, Jepang yang merupakan pangsa penting dari ekonomi dunia yang tentunya akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan HAM bukan hanya di ASIA tapi di tingkat dunia. Saya berharap

di sesi kedua hari ini akan terjadi diskusi yang terkait dengan ini secara khusus dan produktif.

Bapak Ibu yang terhormat!

Di tahun 2014 adalah tahun yang banyak kemajuan dari pada tahun sebelumnya secara Internasional terhadap masalah HAM Korea Utara yaitu presentasi laporan COI, Pemilihan Komisi HAM PBB, Pemilihan resolusi HAM Korea Utara sidang umum PBB, mengirim dan pemilihan Dewan keamanan PBB dan dll.

Selain itu ditahun ini pada bulan 3 dijadwalkan penempatan office HAM Korea Utara PBB di Seoul. Saya yakin dengan kerja keras masyarakat dan serangkaian kemajuan proses menjadi pesan pengharapan dan penghiburan bagi masyarakat Korea Utara dan yang suatu hari nanti akan berperan memperbaiki HAM Korea Utara.

Meskipun HAM masyarakat Korea Utara terperangkap didalam es yang begitu keras dan tebal. Perhatian dan upaya kami yang berdiri di tempat ini akan melelehkan es itu sedikit demi sedikit.

Sekali lagi saya terimakasih kepada seluruh team yang bekerja sama serta seluruh hadirin yang hadir sehingga Symposium ini bisa berjalan dengan baik dan saya berharap kedepannya bisa bergabung dengan komisi kami untuk memperbaiki HAM Korea Utara.

Terimakasih.

2015. 2. 10.

Ketua Komisi Nasional HAM

Hyun, Byung-Chul

프로그램

- 개최일시 : 2015년 2월 10일(화), 11:30~18:05
- 개최장소 : 술탄호텔 자카르타 (Sultan Hotel Jakarta), 인도네시아
- 주 제 : 북한인권 개선을 위한 국제사회 공조방안
 - 1세션 : 반인도범죄 해소를 위한 국제사회의 역할
 - 2세션 : 북한인권 개선을 위한 아세안지역 협력방안
- 주최기관
 - 국가인권위원회 (National Human Rights Commission of Korea)
 - 인도네시아 과학원 (LIPI, Indonesian Institute of Science)
 - 인도네시아 인권위원회 (Komnas HAM, National Commission on Human Rights Indonesia)
 - AICHR 인도네시아 대표부 (Indonesian Representative to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)
- 사용언어 : 한국어, 인도네시아어, 영어

| 시 간 | 내 용 |
|----------------------|---|
| 11:30~12:00 | 참가자 등록 |
| 12:00~13:00 | 오찬 |
| 13:00~13:30 (30분) | 개회식 - 사 회 : 정책교육국장 - 개회사 : ① 현병철 (국가인권위원장) ② Iskandar Zulkarnain (인니 과학원장) ③ Hafid Abbas (인니 인권위원장) |
| 13:30~13:45 | - 기념촬영, 회의실 정리 등 |
| 13:45~14:15 (30분) | 기조연설 - Marzuki Darusman(유엔북한인권특별보고관) |

프로그램

북한인권 개선을 위한 국제심포지움

| 시 간 | 내 용 |
|-----------------------|---|
| 14:15~15:55 (100분) | <p>1세션 : 반인도범죄 해소를 위한 국제사회의 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사회 : 라종일 (한양대 석좌교수) - 발제 <ul style="list-style-type: none"> ① 권오곤 (유고슬라비아국제형사재판소 상임재판관) : COI보고서에 나타난 반인도범죄를 중심으로 ② Adriana Elisabeth (인니과학원 정치연구센터장) : 아시아지역의 반인도범죄 사례 및 국제적 차원의 협력 방안을 중심으로 - 토론 <ul style="list-style-type: none"> ① 홍성필 (연세대 교수) ② 백범석 (경희대 교수) ③ Mangadar Situmorang (Parahyangan 대학교 정치사회대학원장) ④ Adriana Venny Aryani (인도네시아 여성폭력방지위원회 상임위원) |
| 15:55~16:15 | coffee break |
| 16:15~17:55 (100분) | <p>2세션 : 북한인권 개선을 위한 아세안지역 협력 방안</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사회 : M. Riefqi Muna(인니과학원 정치학연구센터 선임연구원) - 발제 <ul style="list-style-type: none"> ① 김광진 (국가안보전략연구원 연구위원) : 해외 탈북자 및 난민 문제 등에 대한 지역 협력 방안 ② Rafendi Djamin (아세안정부간인권위원회 위원) : 동남아 지역 차원의 북한인권 문제 접근 방안 제안 - 토론 <ul style="list-style-type: none"> ① 윤남근 (국가인권위원회 북한인권특별위원회위원장) ② 이정훈 (인권대사) ③ Ani Widayani Soetjipto (인도네시아대학교 국제관계대학 조교수) ④ Haris Azhar (KontraS 코디네이터) |
| 17:55~18:05 (10분) | <p>폐회사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유영하 (국가인권위원회 상임위원) |

PROGRAM

2015 International Symposium on North Korean
Human Rights(Draft)

- Host : NHRCK(National Human Rights Commission of Korea),
LIPI (Indonesia Institute of Sciences)
Komnas HAM (National Commission on Human Rights Indonesia)
Indonesian Representative to the AICHR
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)
- Date : 10 February, 2015(Tue), 11:30~18:05
- Venue : Sultan Hotel Jakarta, Golden Ballroom A
- Language : Korean, Indonesian, English

| Time | Contents |
|-----------------------|--|
| 11:30~12:00 | Registration |
| 12:00~13:00 | Lunch |
| 13:00~13:30 (30분) | Opening Ceremony – Moderator : Shim, Sang-don (Director-general of the NHRCK) Person from LIPI Opening remarks : 1. Hyun, Byung-chul (Chairperson of the NHRCK) 2. Dr. Iskandar Zulkarnain (Chairman of LIPI) 3. Dr. Hafid Abbas (Chairperson of Komnas HAM Indonesia) |
| 13:30~13:45 | Commemorative photo session |
| 13:45~14:15 (30분) | Keynote Speech : Marzuki Darusman (UN Special Rapporteur on the situation human rights in the DPRK) |
| 14:15~15:55 (100분) | Session 1 : Role of International Community to Address Crimes Against Humanity – Moderator : Ra, Jong-yil (University Distinguished Professor of Hanyang Univ.) |

PROGRAM

2015 International Symposium on North Korean
Human Rights(Draft)

| Time | Contents |
|-----------------------|---|
| 14:15~15:55 (100분) | <ul style="list-style-type: none">- Presentation:<ol style="list-style-type: none">1. Kwon, O-gon (Judge, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) : Focusing on crimes against humanity in COI report2. Dr. Adriana Elisabeth (Head of Center for Political Studies LIPI) : Focusing on cases in Asia and proposals of international cooperation to improve- Panels :<ol style="list-style-type: none">1. Hong, Seong-phil (Professor of Yonsei Univ.)2. Baek, Buhm-suk (Professor of Kyunghee Univ.)3. Dr. Mangadar Situmorang (Dean of Faculty of Political and Social Sciences Parahyangan Univ.)4. Adriana Venny Aryani (Plenary Commission Member of National Commission on Violence Against Woman) |
| 15:55~16:15 | coffee break |
| 16:15~17:55 (100분) | <p>Session 2 : Measures of regional cooperation in Asia to improve North Korean Human Rights</p> <ul style="list-style-type: none">- Moderator : Dr. M. Riefqi Muna (Senior Researcher at Center for Political Studies LIPI)- Presentation:<ol style="list-style-type: none">1. Kim, Kwang-jin (Institute for National Security Strategy) : Focusing on measures of regional cooperation on North Korean defectors and refugees2. Rafendi Djamin (Indonesian Representative to the AICHR) : Focusing on how to approach on North Korean human rights agenda in South East Asia countries- Panels<ol style="list-style-type: none">1. Yoon, Nam-geun (Commissioner of NHRCK)2. Lee, Jeong-hoon (Human Rights Ambassador of Korea)3. Ani Widyani Soetjipto (Senior Lecturer at Department of International Relations University of Indonesia)4. Haris Azhar (Coordinator of KontraS) |
| 17:55~18:05 (10분) | <p>Closing Remarks</p> <ul style="list-style-type: none">- Yoo, Yeong-ha (Standing Commissioner of the NHRCK) |

목 차

- COI보고서에 나타난 반인도범죄를 중심으로 1
Focusing on crimes against humanity in COI report
발제: 권오곤 (유고슬라비아국제형사재판소 상임재판관)
Kwon, O-gon (Judge, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)

- 아시아지역의 반인도범죄 사례 및 국제적 차원의 협력 방안을 중심으로 17
Focusing on cases in Asia and proposals of international cooperation to improve
발제: Adriana Elisabeth (인니과학원 정치연구센터장)
Dr. Adriana Elisabeth (Head of Center for Political Studies LIP)


- 해외 탈북자 및 난민 문제 등에 대한 지역 협력 방안 29
Focusing on measures of regional cooperation on North Korean defectors and refugees
발제: 김광진 (국가안보전략연구원 연구위원)
Kim, Kwang-jin (Institute for National Security Strategy)



COI보고서에 나타난 반인도범죄를 중심으로
Focusing on crimes against humanity in COI report

권오곤 (유고슬라비아국제형사재판소 상임재판관)

Kwon, O-gon (Judge, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)



북한 인권조사위원회 보고서에 관하여

■ 권오곤 (유고슬라비아 국제형사재판소 상임재판관)

1. 먼저 북한 인권실태에 관해 논의하는 이 중요한 자리에 함께 할 수 있게 해주신 국가인권위원회에 감사드립니다. 국제사회의 관심이 절실한 해당 현안을 논의하는 자리에 참석할 수 있게 되어 영광스럽게 생각합니다. 특히 마르주끼 다루스만 유엔 북한인권 특별보고관께 북한인권조사위원회를 위해서 노력해주신데 대해 깊은 감사의 말씀을 전합니다.
2. 우선 제가 구유고슬라비아 국제형사재판소 재판관을 역임했지만 오늘 이 자리에는 국제형사재판소나 유엔을 대표해서가 아닌 저 자신의 견해를 밝히기 위해 서있다는 점을 먼저 말씀드리고 싶습니다.
3. 오늘 저는 특히 반인도범죄를 중심으로 유엔 북한인권조사위원회 보고서를 간략히 설명한 후 해당 범죄 해결을 위한 국제사법처리에 대한 견해를 말씀 드리면서 마무리하겠습니다.
4. 아시다시피 2013년 3월 유엔인권이사회의 결의로 설립된 북한인권조사위원회는 2014년 2월 북한 인권실태에 대한 상세한 보고서를 발표했습니다.¹⁾ 기념비적인 의미가 있는 조사위의 보고서는 사상, 표현 및 종교의 자유 침해, 이동 및 거주 자유 침해, 식량권 및 관련 생명권 침해, 자의적 구금, 고문 및 비인간적 처우, 강제

1) 조선민주주의인민공화국 인권조사위원회 보고서, 2014년 2월 7일, UN Doc. A/HRC/25/CRP.1 ("COI 보고서").

실종 및 납치, 국가가 정한 사회 계층, 성별 및 장애에 따른 차별 등 북한의 처참한 인권침해 실상을 고발했습니다.²⁾ 각종 인권침해 사례 이외에도 조사위는 반인도범죄로 분류될 수 있는 조직적이고 광범위하며 중대한 제도적, 개인적 범죄행위를 조사하는 임무를 부여 받았습니다.³⁾

5. 조사위는 사법 기구도, 검찰 기관도 아니기에 개인의 형사 책임에 대한 최종 판단을 내릴 수는 없지만, 조사결과가 ‘합리적인 근거’에 기반하고 있다는 점을 주지했습니다.⁴⁾ 다시 말해 조사위는 조사결과가 권한 있는 국내·국제 사법 기관이 범죄 수사에 착수할 수 있을 만큼의 반인도범죄가 자행되었다는 합리적인 근거가 되는지에 대해서는 판단할 수 있다고 밝혔습니다.⁵⁾

6. 조사위는 중대한 인권침해 실태에 대한 실질적인 조사결과에 근거해 반인도범죄 발생 여부를 조사했습니다. 조사위는 다음과 같은 여섯 종류의 피해자 집단에 집중했습니다.

- 정치범 수용소 수감자
- 일반 수용소 수감자와 정치범
- 종교인, 체제전복을 시도할 것으로 예상되는 자
- 탈북하려는 자
- 기아로 고통 받는 주민
- 외국인 납치 및 강제실종 피해자.⁶⁾

7. 조사위는 국제형사재판소 설립을 위한 로마규정에 의거해 반인도범죄를 정의했습니다. 또한 로마규정에 명시된 범죄의 구성요소는 오늘날에도 국제 관습법 상의 반인도범죄에 대한 정의를 반영한다고 밝혔습니다.⁷⁾ 조사위가 규정한 반인도범죄의 정

2) COI 보고서 IV장 참조.

3) COI 보고서 1022항.

4) COI 보고서 1023항.

5) COI 보고서 1023항.

6) COI 보고서 1024항.

7) COI 보고서 1026항.

4_ 북한인권 개선을 위한 국제심포지움

의는 다음과 같습니다. 첫째, 개인은 고의적으로 비인도적 행위를 해야 합니다. 둘째, 이러한 비인도적인 행위가 민간인 주민에 대한 광범위하거나 조직적인 공격에 포함되어야 합니다.⁸⁾ 또한 조사위는 로마규정에서 이러한 공격이 국가나 조직의 정책에 따른 것이거나 이를 조장하기 위한 것이어야 한다고 명시하고 있습니다. 조사위는 비인도적 행위를 다음과 같이 분류했습니다.

- 살해
- 절멸
- 노예화
- 주민의 추방 또는 강제이주
- 국제법의 근본원칙을 위반한 구금 또는 신체적 자유의 심각한 박탈
- 고문
- 성폭행, 성적 노예화, 강제매춘, 강제임신, 강제불임, 또는 이에 상당하는 중대한 성폭력
- 정치적, 인종적, 국민적, 민족적, 문화적, 종교적 사유, 성별 또는 보편적으로 국제법상 허용되지 않는 다른 사유에 근거한 집단적 박해
- 강제실종
- 신체적, 정신적, 육체적 건강에 대해 중대한 고통이나 심각한 피해를 고의적으로 야기하는 비인도적인 행위의 “잔여 범주”.⁹⁾

8. 이러한 비인도적인 행위를 검토한 결과 조사위는 북한 당국이 반인도범죄를 자행했다는 판단을 내렸습니다.¹⁰⁾ 특히 정치범수용소와 일반 수용소에서 반인도범죄가 발생했다는 증거를 찾았습니다. 수용소에서 발생한 비인도적인 행위로는 적법 절차를 따르지 않은 구금, 강제실종, 절멸, 살해, 노예화, 고문과 극도의 비인도적인 구금환경, 성폭행 및 기타 성폭력, 박해, 주민의 강제이주가 있습니다.¹¹⁾ 조사위는 북한의 정치범수용소와 일반 수용소에서 비인도적인 행위가 상당한 규모의 조직이 개입된

8) COI 보고서 1027항.

9) COI 보고서 1028항.

10) COI 보고서 V장.

11) COI 보고서 1034 - 1059, 1069 - 1081항.

가운데 대규모로 발생하고 있어, 정부정책에 의한 조직적이고 광범위한 공격에 상응한다고 판단했습니다.¹²⁾

9. 또한 조사위는 특정한 사회 계층이 반인도범죄 대상이 되었다는 사실을 발견했으며, 여기에는 종교인, 체제전복을 시도할 것으로 보이는 자, 탈북을 시도하려는 자, 외국인 납북자 등이 포함됩니다. 이들을 대상으로 자행된 비인도적 행위에는 구금, 고문, 살해, 박해, 성폭행 및 기타 성폭력, 강제 실종 등이 있습니다.¹³⁾ 조사위는 앞서 언급한 일련의 비인도적 행위 역시 정부정책에 의한 조직적이고 광범위한 공격에 상응한다고 판단했습니다.
10. 마지막으로 조사위는 북한 고위층이 대규모 기아와 그로 인한 사망 및 심각한 정신적, 신체적 상해를 야기하는 정부 정책을 시행하여 반인도범죄를 자행했다는 증거를 발견했습니다.¹⁴⁾ 여기에는 절멸, 살해, 심각한 정신적, 신체적 피해를 입히는 비인도적인 행위가 포함되어 있습니다.¹⁵⁾ 조사위는 앞서 언급한 행위가 굶주림을 악화하고 일반 주민을 상당수 희생하면서까지 정치 체제와 지도부를 유지하기 위해 실시한 정부정책에 의한 조직적이고 광범위한 공격에 상응한다고 판단했습니다.¹⁶⁾
11. 조사위는 보고서 말미에 북한, 중국을 비롯한 기타 국가, 국제사회, 유엔 등을 대상으로 한 여러 권고사항을 제시했습니다. 여기에서는 조사위의 일부 권고사항에 대해 간단히 이야기하겠습니다. 첫 번째 권고사항은 유엔 안전보장이사회가 국제형사재판소에 북한을 회부하는 것입니다.¹⁷⁾ 더 나아가서 조사위는 안보리가 반인도범죄 책임자를 대상으로 한 제재를 채택할 것을 권고했습니다. 안보리는 로마규정 제13조 나목 및 유엔헌장 제7장에 근거하여 북한의 인권 문제를 국제형사재판소에

12) COI 보고서 1060 - 1067, 1082 - 1086항

13) COI 보고서 1091 - 1094, 1100 - 1108, 1139 - 1148항.

14) COI 보고서 1115항.

15) COI 보고서 1117 - 1131항.

16) COI 보고서 1132항.

17) COI 보고서 1225(a)항.

6_ 북한인권 개선을 위한 국제심포지움

회부할 수 있습니다. 다만 해당 권고사항은 국제형사재판소가 로마규정 당사국에 대해서만 사법권을 지닌다는 사실을 간과하고 있습니다. 안보리는 유엔헌장 제7장을 인용하여 다르푸르¹⁸⁾와 리비아¹⁹⁾ 사태를 국제형사재판소에 회부하고자 한 바 있습니다. 한 가지 문제는 국제형사재판소에 회부되었다 하더라도 로마규정 제11조에 따르면 2002년 7월 이전에 행해진 범죄까지는 그 관할권이 미치지 않는다는 점입니다. 또 다른 문제점은 국제형사재판소든 특별 재판소든 관계 없이 기소된 범죄자들을 실제로 법정에서 세우는 문제입니다. 하지만 조사위가 지적했듯이 국제형사재판소에 회부하는 데서 오는 실질적인 이점은 이미 법정과 절차, 재판관 등이 마련되어 있다는 것입니다.

12. 조사위가 제시한 또 다른 해결방안은 안보리가 구유고슬라비아 및 르완다 국제군사재판소의 설립과 같은 기존 선례와 마찬가지로 북한 인권문제를 다루는 임시 재판소를 설치하는 것입니다.²⁰⁾ 안보리가 별도의 조치를 취하지 않을 경우를 대비해 조사위는 총회가 '평화를 위한 단합' 결의에 인정된 잔여 권한을 사용하거나 '모든 당사국의 결합된 주권으로써 보편적 사법권 원칙에 근거하여 반인도범죄의 책임자를 재판할 수 있다'고 제시했습니다.²¹⁾ 하지만 정치적인 현실을 고려할 때 총회가 행동을 취할 가능성은 낮습니다.
13. 향후 동일한 범죄 발생을 억제하기 위해서는 북한 고위층에 국제적으로 처벌대상이 될 수 있다는 점을 고지할 필요가 있습니다. 국제사회의 위임을 받은 사법 체계에 따라 북한 민간인 상급자나 군 지휘관 등 가장 책임이 중한 자가 법의 심판을 받도록 해야 합니다. 상급자는 범죄를 실제로 저지른 주체가 아니기 때문에 개인의 형사 책임에 기초해 지도부 및 상급자 책임 원칙을 포함할 필요가 있습니다. 이

18) UNSC 결의 1593호 (2005년), 2005년 3월 31일, UN Doc. S/RES/1593(2005) 참조.

19) UNSC 결의1970호 (2011년), 2011년 2월 26일, UN Doc. S/RES/1970(2011) 참조.

20) COI 보고서 1201(2)항.

21) COI 보고서 1201(2)항. 총회 결의 제377조 5장(1950년 11월 3일)은 상임이사국이 만장일치에 도달하지 못해 평화에 대한 위협이나 공격이 예상되는 상황에서도 안전보장이사회가 국제 평화 및 안보 수호라는 가장 중요한 책임을 달성하지 못할 경우, 총회는 회원국에 적절한 집단적인 조치를 권고함으로써 직접 문제를 다룰 수 있다.

는 피고인이 자행된 범죄에 대해 알고 있었거나 알아야 했는지에 대한 평가를 요합니다. 따라서 김정은 최고지도자를 포함한 북한 군부와 민간 고위층 지도부가 반인도범죄가 발생했거나 자행되고 있다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 때문에 조사위의 보고서를 포함한 모든 정보를 북한 지도부에 전달해야 할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 고위급 회담, 정상회담, 북한 지도부와 다른 관련 국가의 당국자 간의 회의 등 다양한 수단을 사용할 수 있습니다. 또한 북한 지도부는 유엔 특별보고관과 회담을 갖고 방북을 허용해야 합니다. 이러한 사전고지 노력을 통해 역시 효과를 기대할 수 있을 것이라고 봅니다.

14. 더욱이 사법 처리를 위해서는 향후 법적 절차에 사용될 수 있는 증인의 진술을 확보하고 문서화할 필요가 있습니다. 증인의 진술이 법적 절차에서 적합한 수준임을 보장할 수 있는 절차상의 보호장치가 요구됩니다. 즉, 법적인 전문가가 희생자와 증인을 면담을 진행하여 증인에 신빙성이 있고, 증인들에 대한 질문이 특정 답변을 유도하지 않으며, 증인을 신뢰할 수 있는지를 확인해야 합니다. 변호나 홍보 목적으로 증인을 인터뷰하는 것과 법적 절차를 위해 인터뷰하는 것에는 분명한 차이가 있습니다. 조사위는 희생자들의 진술을 확보하는 놀라운 작업에 착수했고 진술을 사법처리에도 사용할 수 있도록 앞으로도 노력을 지속해야 합니다. 특히 법정에서 희생자들이 발언할 수 있는 기회를 제공해야 합니다. 사법처리 상의 논란이 없도록 증인의 법적 실효성을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

15. 마지막으로 법적인 책임 규명은 향후의 화합을 위해서도 중요하다는 점을 강조하고 싶습니다. 통일이나 화합을 저해할지 모른다는 우려로 인해 사법처리를 꺼리는 이들이 있을지도 모릅니다. 하지만 저는 정의 없이는 평화도 지속될 수 없으며, 한반도의 미래를 위해 평화와 정의를 함께 지켜가야 한다고 굳게 믿습니다.

OBSERVATIONS ON THE REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY
ON HUMAN RIGHTS IN THE DPRK

1. First of all, I would like to thank the National Human Rights Commission of the Republic of Korea for inviting me here today to participate in this important symposium on the human rights situation in the Democratic People's Republic of Korea. It is an issue that deserves our attention and I am honoured to be part of the discussion today. I would also like to thank, in particular, His Excellency Marzuki Darusman, not only for his work as the Special Rapporteur on the DPRK but also for his work as part of the Commission of Inquiry.

2. As a caveat, I would like to state that although I am a Judge at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the views I am expressing here today are my own and not those of the Tribunal or of the United Nations.

3. Today, I will be providing a brief overview of the United Nations Commission of Inquiry's report on the DPRK, with a particular focus on the Commission's findings on crimes against humanity, and concluding with some thoughts on international justice mechanisms that may address these crimes.

4. As you will recall, in February 2014, the Commission, which had been established in March 2013 by the UN Human Rights Council, published a detailed report of its findings on human rights in the DPRK.¹ This landmark report shed a very public light on the devastating human rights situation in that country. The report detailed a litany of human right violations, including violations of the freedom of thought, expression and religion; freedom of movement and residence; the right to food and related aspects of the right to life; arbitrary detention, torture and inhuman treatment;

¹ Report of the detailed findings of the commission of inquiry's on human rights in the Democratic People's Republic of Korea, 7 February 2014, UN Doc. A/HRC/25/CRP.1 ("COI Report").

enforced disappearances and abductions; and discrimination on the basis of state-assigned social class, gender and disability.² In addition to human rights violations, the Commission was mandated to examine issues of institutional and personal accountability for grave, systematic and widespread violations, in particular where they amount to crimes against humanity.³

5. The Commission noted that it was neither a judicial body nor a prosecutor and as such it could not make a final determination of individual criminal responsibility, however, where it made findings on crimes against humanity, it was on the basis of a “reasonable grounds” assessment.⁴ In other words, it could determine whether its findings established reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed so as to merit a criminal investigation by a competent national or international organ of justice.⁵

6. The Commission focused its crimes against humanity conclusions on the factual findings of gross human rights violations. It therefore focused its analysis on six groups of victims, namely

- inmates of political prison camps;
- inmates of the ordinary prison system, in particular the political prisoners among them;
- religious believers and others considered to introduce subversive influences;
- persons who try to flee the country;
- starving populations; and
- persons from other countries who became victims of international abductions and enforced disappearances.⁶

7. As for the definition of crimes against humanity, the Commission used the definition from the Rome Statute of the International Criminal Court and the elements of crimes therein. It stated that this definition reflected the definition of crimes against humanity under customary international

² COI Report, Section IV.

³ COI Report, para. 1022.

⁴ COI Report, para. 1023.

⁵ COI Report, para. 1023.

⁶ COI Report, para. 1024.

law today.⁷ Therefore, the definition used by the Commission was as follows: first, the individual must commit certain inhumane acts with the requisite criminal intent and second, these inhuman acts must form part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population.⁸ It noted that the Rome Statute also required that the attack must be pursuant to, or in furtherance of, a state or organizational policy. The Commission set forth a list of inhumane acts that were relevant for its inquiry. These inhumane acts included:

- murder;
- extermination;
- enslavement;
- deportation or forcible transfer of a population;
- imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- torture;
- rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law;
- enforced disappearance of persons; and
- the “residual category” of inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.⁹

8. Considering these categories of inhumane acts, the Commission found that the DPRK authorities have committed and are committing crimes against humanity.¹⁰ In particular, it found that crimes against humanity were committed in the political prison camps and the ordinary prison system. The inhumane acts committed in the prison system included imprisonment without due process, enforced disappearances, extermination and murder, enslavement, torture and inhumane detention conditions, rape and other forms of sexual violence, persecution, and forcible transfer of a

⁷ COI Report, para. 1026.

⁸ COI Report, para. 1027.

⁹ COI Report, para. 1028.

¹⁰ COI Report, Section V.

population.¹¹ The Commission found that the inhuman acts were perpetrated in both the political prison camps and the ordinary prison system on such a scale and with such a level of organization that they amounted to a systematic and widespread attack pursuant to a State policy.¹²

9. The Commission also found that certain classes of people are the targets of crimes against humanity, most notably, religious believers; people who are thought to be subversive to the government; people who try to leave the country; and nationals from other countries who are victims of international abductions. The inhumane acts committed included imprisonment, torture, murder, persecution, rape and other forms of sexual violence, and enforced disappearances.¹³ Again, the Commission found that these inhumane acts were part of a widespread and systematic attack pursuant to a State policy.

10. Finally, the Commission found that crimes against humanity were committed by officials of the DPRK in enacting state policies that led to mass starvation and death, and serious mental and physical injury.¹⁴ The inhumane acts included extermination, murder, and other inhumane acts such as severe mental and physical harm.¹⁵ The Commission found these policies that aggravated mass starvation formed part of a widespread and systematic attack pursuant to a State policy to sustain a political system and the leadership at all costs.¹⁶

11. The Commission ended its report with a variety of recommendations. The recommendations were directed towards the DPRK, to China and other states, to the international community and the United Nations. I will briefly touch upon some of the recommendations in this last category. The first recommendation was that the United Nations Security Council refer the situation in the DPRK

¹¹ COI Report, paras. 1034–1059, 1069–1081.

¹² COI Report, para. 1060–1067, 1082–1086

¹³ COI Report, paras. 1091–1094, 1100–1108, 1139–1148.

¹⁴ COI Report, para. 1115.

¹⁵ COI Report, paras. 1117–1131.

¹⁶ COI Report, para. 1132.

to the International Criminal Court for action.¹⁷ It further recommended that the Security Council adopt targeted sanctions against individuals who may be the most responsible for crimes against humanity. With respect to an ICC referral, under Article 13(b) of the Rome Statute, the Security Council may, acting under its Chapter VII powers, refer a situation to the Prosecutor of the ICC. This referral mechanism bypasses one important precondition for jurisdiction of the ICC namely, that the court only has jurisdiction over States who are parties to the Rome Statute. We have seen the Security Council use its Chapter VII power to refer situations to the ICC in two previous cases, for Darfur¹⁸ and for Libya.¹⁹ One limitation to a Security Council referral is the ICC's own limit on its temporal jurisdiction under Article 11, which states that the Court has jurisdiction over crimes committed after the entry into force of the statute, namely after July 2002. Another challenge is obtaining the physical presence of indictees, which has been a problem at the ICC and was also a problem faced by the ad-hoc tribunals. However, as the Commission states, a practical advantage to an ICC referral is that the Court is already established, with procedures and personnel already in place.

12. Another option the Commission proposed was the establishment of an ad-hoc international tribunal for the DPRK, similar to the ad-hoc international criminal tribunals established by the Security Council for the former Yugoslavia and for Rwanda.²⁰ Perhaps anticipating that the Security Council would not take action, the Commission also proposed that the General Assembly could rely on its residual powers recognized in the "Uniting for Peace" resolution and the "combined sovereign powers of all individual Member States to try perpetrators of crimes against humanity on the basis of the principle of universal jurisdiction".²¹ However, the political reality is that the General Assembly will probably not take up this issue.

¹⁷ COI Report, para. 1225(a).

¹⁸ UNSC Resolution 1593 (2005), 31 March 2005, UN Doc. S/RES/1593(2005).

¹⁹ UNSC Resolution 1970 (2011), 26 February 2011, UN Doc. S/RES/1970(2011).

²⁰ COI Report, para. 1201(2).

²¹ COI Report, para. 1201(2). The General Assembly Resolution 377 A (V), 3 November 1950, states that if the Security Council, due to lack of unanimity of its permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the

13. In order to deter crimes from continuing in the future, high ranking leaders in the DPRK should be put on notice that they may be the subject of a future international criminal prosecution. In terms of criminal prosecution, international criminal cases try those persons who are the most responsible for alleged crimes, in other words, high level civilian and military leaders. These high level leaders are generally not the physical perpetrators of the crimes. It therefore requires an assessment of other modes of liability, including the concept of command responsibility or superior responsibility as the basis for individual criminal responsibility. This would require an assessment of whether the accused person knew or should have known that crimes would be or were being committed. Accordingly, it is important that the people who occupy high levels of leadership in the DPRK, both civilian and military, including Kim Jong-Un, are informed and put on notice about the allegations that crimes against humanity were and are being committed. Information, including the content of the Commission's report, should be communicated to leadership in the DPRK. This may be accomplished through a variety of means, including high-level dialogue, a summit, or meetings with leaders of the DPRK and other interested nations. DPRK leaders should also meet with the Special Rapporteur and allow him access to the country. I believe that such notice will also have a deterrent effect.

14. In addition, in terms of potential criminal prosecution, it is important that witness statements be collected and documented in such a way that they may be used in future legal proceedings. There must be procedural safeguards in place that will ensure that the witness statements have probative value that withstand the scrutiny of legal proceedings. This means, when interviewing victims and witnesses, it is important that there are legally-trained professionals who conduct the interviews and ensure that the content of the narrative is truthful, that the questions posed to the witnesses are not leading, and that the credibility of the witness is tested. There is a difference between witness

maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to members for collective measures.

interviews conducted for advocacy or publicity purposes and witness interviews conducted for the purposes of legal proceedings. The Commission started the incredible work of collecting victims' statements and this work should continue, with an eye to using these statements in a criminal prosecution. The voices of the victims must be heard, especially in criminal proceedings. However witness testimony must also be able to withstand legal scrutiny otherwise, the legitimacy of the legal proceeding may be called into question.

15. I will end my remarks by saying that justice and accountability are important aspects to any future reconciliation process. There may be those who shy away from the notion of a criminal prosecution for fear that it will interfere with reunification or reconciliation. However, I firmly believe that there is no sustainable peace without justice and that peace and justice must work hand-in-hand for the future of the Korean peninsula.



**아시아지역의 반인도범죄 사례 및 국제적 차원의
협력 방안을 중심으로**

Focusing on cases in Asia and proposals of international
cooperation to improve

Adriana Elisabeth (인니과학원 정치연구센터장)

Dr. Adriana Elisabeth (Head of Center for Political Studies LIPI)

Isu HAM dalam Perspektif Internasional: Kasus Korea Utara

Simposium Internasional, Hotel
Sultan Jakarta, 10 Februari 2015

Pengantar

- HAM masih dipahami sebagai isu yang berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan isu lain ataupun dengan dinamika di berbagai level.
- HAM adalah persoalan klasik yang sering berulang, tidak unik.
- Perbaikan kondisi HAM sulit dilakukan, meskipun banyak kerjasama internasional.

Sistematika Presentasi

- Perkembangan isu HAM
- Pendekatan dalam Memahami HAM
- Isu HAM Korea Utara
- Upaya perbaikan HAM Korea Utara melalui kerjasama internasional

Perkembangan Isu HAM

- HAM bagian dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
- HAM bukan isu tunggal, tapi berhubungan dengan dinamika politik, keamanan, dan ekonomi, di tingkat nasional/lokal, regional dan global.
- Pada umumnya, HAM dimaknai sebagai isu-isu marginal dalam konteks pertentangan norma dan nilai → misalnya masalah tanah adat, posisi perempuan dalam keluarga atau komunitas dan lain-lain.

Perkembangan Isu HAM (2)

- HAM dalam dinamika politik, keamanan dan ekonomi di tingkat nasional dan regional/global.
 - Konflik vertikal, konflik komunal & kekerasan politik yang menjurus pada pelanggaran HAM.
 - Kepentingan ekonomi → MNCs *vs* masyarakat lokal.
 - Keamanan regional dalam konteks persaingan kekuatan besar/eksternal.

1. Pendekatan menurut Tingkat Analisa

- Pendekatan Lokal/Nasional
- Pendekatan Regional:
 - Komitmen dalam mengimplementasikan HAM dan demokrasi di ASEAN .
- Pendekatan Global:
 - Global issue/agenda sama seperti isu-isu demokrasi, gender, lingkungan hidup dan kejahatan kemanusiaan
 - Kerjasama internasional: Uni Eropa, PBB, ICC, dll.
- Internasional: prinsip, norms, nilai universal
- Regional: prinsip universal + prinsip regional (Piagam ASEAN)
- Nasional: prinsip universal + Konstitusi Negara/Konteks Lokal
- Individual: pengetahuan dan pemahaman personal/individu mengenai HAM yang berasal dari keluarga, ajaran agama, komunitas/masyarakat tertentu

2. Pendekatan *Discourse Analysis*

- *Fact findings*, Laporan penelitian, Laporan investigasi → Pelapor Khusus PBB dan *Commission of Investigation* (Col)
- Kemaunan (willingness) dan Kemampuan (capability) setiap negara.
- Dinamika Regional/Global:
 - ASEAN (AICHR)
 - Uni Eropa (sub-komisi HAM di Parlemen Eropa)
 - Resolusi PBB
 - International Criminal Court, dan lain-lain.

Hambatan dalam perbaikan HAM

- Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai substansi/urgensi untuk memperbaiki HAM.
- Tidak ada hubungan langsung dengan kepentingan nasional, sehingga tidak ada urgensi untuk merespon segera.
- Terikat pada prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, karena HAM merupakan isu domestik.

3. Pendekatan Hubungan Internasional

- *Offensive human rights:*
 - pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara lain.
- *Defensive human rights:*
 - penandatanganan kesepakatan dan ratifikasi traktat,
 - Mengintegrasikan standar HAM ke dalam konstitusi nasional (national law).

HAM, Politik dan Demokrasi

1. Regim otoriter
2. Kekerasan politik lokal, misalnya bentrok antara pendukung calon kepala daerah, konflik antar *clan*.
3. Konflik Vertikal and konflik Komunal.
4. Kolusi antara pemerintah dan pengusaha “melawan” masyarakat lokal.
5. Demokrasi merupakan bagian dari pemenuhan HAM *versus* HAM berbeda dengan demokrasi. Kemajuan demokrasi tidak paralel dengan perbaikan HAM.

HAM & Keamanan Regional Asia Timur

- HAM Korea Utara adalah salah satu isu di Semenanjung Korea.
- Masalah lain antara Korea Utara-Korea Selatan adalah:
 - Perang yang belum selesai
 - Reunifikasi 2 Korea
 - Pengembangan nuklir Korea Utara
 - Masalah konflik perbatasan antarnegara kawasan Asia Timur

Akar Masalah HAM Korea Utara

- Ideologi “Juche” yang dianut oleh Rejim Pyongyang (dengan sistem Stalinist) telah bertentangan dengan **esensi sebuah negara yang berdaulat** terdiri dari: Pemerintah, Rakyat dan Wilayah.
- Rejim Korea Utara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara berlapis → (1) tidak mengizinkan dua bangsa bersaudara untuk bertemu, (2) tidak mampu menyejahterakan rakyat Korea Utara secara ekonomi, politik dan keamanan.

Mengapa Rejim Pyongyang bertahan dengan *Juche*?

- AMBISI KEKUASAAN
 - Kekuasaan dan kekuatan para elit politik Korea Utara.
 - Kekayaan ekonomi dinikmati oleh para elit politik.
 - Melanggar HAM rakyat Korea Utara = melawan esensi negara berdaulat.
- PERSAINGAN DENGAN EKSTERNAL POWER
 - Pengembangan senjata nuklir
 - Kebencian terhadap Amerika Serikat
- KETAKUTAN AKAN KEHILANGAN KEKUASAAN & KEKUATAN
 - Paranoid → takut menghadapi rakyatnya sendiri, negara lain di Asia Timur, dan kekuatan eksternal lain

Reaksi Internasional

- Protes
- Mengutuk
- Embargo
- Pemutusan Hubungan
- Pernyataan Solidaritas
- Pelapor Khusus PBB
- Kerjasama internasional untuk perbaikan HAM

Kebijakan Luar Negeri RI dalam Isu HAM

- Konstitusi & UU
 - UUD Negara 1945
 - UU Nomor 39/1999
- Institusi negara:
 - Kemen KumHAM, KPPPA
 - Komisi Nasional: Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak → paling lengkap

Indonesia dan HAM Korea Utara

- Sebagai Pelapor Khusus PBB & anggota tim investigasi (CoI) untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM Korea Utara.
- Mengubah sikap dari abstain menjadi mendukung Resolusi Dewan HAM PBB.
- Mempertahankan hubungan diplomatik dengan Korea Utara

What's Next?

- Membangun pemahaman bersama dan urgensi perbaikan HAM Korea Utara → kampanye melalui media.
- Memantapkan komitmen politik untuk bekerjasama secara bilateral maupun regional/internasional untuk memenuhi aspek HAM:
 - Promosi
 - Protes
 - Pemenuhan
- Mengubah pendekatan → Transformasi Konflik & Dialog.
- Indonesia membangun kerangka bersama menuju keamanan regional yang lebih damai, aman dan stabil → *conceptual leadership*.

Catatan Penutup

- Kerjasama internasional untuk mempertemukan kedua bangsa Korea sebagai bagian dari mengembalikan esensi kedaulatan rakyat Korea Utara.
- Dialog menuju rekonsiliasi antara Korea Utara & Korea Selatan (bukan reunifikasi).
- Kampanye media untuk meningkatkan kepedulian publik tentang urgensi perbaikan kondisi HAM Korea Utara.

Terima Kasih

Dr. Adriana Elisabeth
Kepala Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI)
Jakarta



해외 탈북자 및 난민 문제 등에 대한 지역 협력 방안

Focusing on measures of regional cooperation on North Korean
defectors and refugees

김광진 (국가안보전략연구원 연구위원)

Kim, Kwang-jin (Institute for National Security Strategy)

해외 탈북자 및 난민 문제 등에 대한 지역협력 방안

■ 김광진 (국가안보전략연구원 연구위원)

□ 북한탈출 탈북자 현황

- 절정에 달했던 1990년대 말에 중국에만 10-40만 명이 있는 것으로 추정되었으며, 최근에는 급격히 줄어 2-4만 명으로 추산됨
 - 중국인권연구협회 사무총장 양정밍, 3만명으로 추정, 2004.
 - 중국군사과학원 왕이성, 3-4만명으로 추정, 2004.
 - 미국무부, 7만 5천-12만 5천, 2005.
 - ‘좋은 벗들’, 10만 명, 2006.
 - 국제위기감시기구, 10만 명, 2006.(『북한인권백서』, 통일연구원, 2008)
- 북-중 국경마을 중국지역에 탈북여성들과 중국남성들 사이에 낳은 수만 명의 무국적 아동들이 보호받지 못하고 살고 있는 것으로 파악됨
 - ‘좋은 벗들’이 2006년 1월 북-중 국경마을 135개를 표본 조사한 결과 이들 마을에서 북한여성과 중국남성 사이에 태어난 아이가 267명, 1999년 같은 마을에 거주했던 북한여성의 수를 토대로 아동 출생률을 22%로 보면, 당시 북한 여성 탈북자 규모를 225,000명으로 감안할 때 탈북여성이 출산한 아동의 규모는 49,500명으로 추정됨.(위의 책 p275)
- 러시아에 파견돼 일하는 벌목, 건설 노동자 등 상당수가 현장에서 이탈해 장기간 불법체류중인 것으로 보도되나 정확한 규모는 추산되지 않고 있음
 - 러시아는 공개적으로 100여명의 탈북자들에게 임시망명지위를 허용하였다고 밝히기도 하였다.(러시아 이민국 난민담당과장, 2014.2.4)

- 이외에 몽골, 동남아시아 지역을 포함해 세계 전 지역으로 이동 시도, 태국, 대만, 호주, EU, 미국, 캐나다 등지에 망명신청, 정착

□ 해외 거주 탈북자들이 겪고 있는 인권유린실태

○ 난민지위 불인정 및 신분불안

- 탈북자들이 가장 많이 떠돌고 있는 중국의 경우 '경제적 이유의 불법 월경자'라는 이유로 난민지위를 부여하지 않고 있음
 - * 제네바협약에 따르면 국제법상 난민은 '국적을 가진 나라나 거주지 바깥에 위치하고 있는 자로서 인종, 종교, 국적, 특정사회계층, 정치적 의견을 이유로 박해를 받을 만한 근거 있는 공포로 인해 귀환을 원하지 않는 자'를 의미한다.
- 동시에 북한과 1960년 체결한 '조-중 탈주자 및 범죄인 상호인도 협정'에 따라 경제적 사유에 따른 불법 월경자를 북한으로 인도할 의무가 있다는 입장임
- 또한 유엔난민고등사무소 등의 활동에도 큰 제약이 존재
 - * "중국에는 난민여부를 결정하는 난민판결과정이 없고, 또한 유엔난민고등사무소는 국경지방에 있는 북한주민들에 접근할 수 없기 때문에 얼마나 많은 탈북자들이 정치적 박해의 두려움으로 망명보호를 찾고 있는지는 확인할 수 없는 실정입니다." (Roberta Cohen, Hearing of the Congressional-Executive Commission on China, March 05, 2012)
- 따라서 중국 내 체류하고 있는 탈북자들이 호소하는 가장 큰 불안과 고통은 언제 중국공안에 잡히거나 밀고 될지 모르는 신분문제이며, 이로 인한 인권유린들이 많이 파생되고 있음
- 중국에서 신분이 보장되면 굳이 더 큰 위험을 무릅쓰고 한국행을 하지 않았을 것이라는 증언도 다수 있음

○ 강제복송 및 북한 내 가혹한 처벌

- 2013년 5월 라오스에서 복송된 9명의 청소년 사례
- 기타 복송사례들이 수없이 보고되고 있으며 이 과정에 고문, 구타, 강제낙태, 성유린, 구금, 강제노동, 연좌제 처벌, 강제이주, 사형 등 혹독한 인권유린행위들이 만연하고 있으며
 - * 2004년 중국 장춘에서 한국행을 시도하다 송환된 가족의 경우 어머니는 교화 형에 처해졌

으나, 9세, 13세 아들은 구호소로 남겨졌다.

2005. 가을, 청진 도 집결소, 30대 여성이 해산하였으나 아이 방치, 사망.

2005.5, 평북도 보위부 집결소, 중국에서 임신하여 송환된 여성이 구류장 출산하였으나 아무도 접근하지 못하도록 하여 영아 사망.

2005.5, 청진 리남구역 농포 도 집결소, 임신 4개월 여성이 보안원의 구타, 강제노동으로 사망.

2004.7, 화령단련대, 32세 산모 강제낙태.

2004.2, 온성군 노동단련대, 막달인 여성을 자연분만하도록 하고, 아이를 엮어서 방치(위의 책, pp291-293).

- 특히 유엔헌장, 인권협약이 보장하는 거주지 및 시민권 선택의 자유와 심지어 북한 헌법에도 명시된 신앙의 자유가 가장 가혹하게 탄압받고 있음

* 북송된 탈북자들에 대한 1차적 조사는 남한에 가려고 시도했거나 결심하였는지 여부, 이를 목적으로 남한사람과 접촉했거나 접촉을 시도한 경우와, 목사를 만났거나 신앙을 접한 경우이며, 이것이 인정될 경우 정치적 범행으로 분류해 가장 가혹하게 처벌하고 있음.

* 국경지역 보위부의 조사내용은 인적사항 및 주소지, 도강시기 및 회수, 도강이후의 행적(한국인 및 기독교인 접촉, 한국행 여부, 인신매매관련 여부, 음란물 및 한국영상물 시청여부)등을 포함.

○ 인신매매

- 다수의 조사, 연구에 따르면 탈북자들의 75.5%정도가 여성비율로 나타나고 있으며, '좋은 벗들'은 이들 중 상당수(51.9%)가 중국남성과 동거형태로 생활하였던 것으로 파악함(위의1 책, p277)

- 또한 다수의 탈북여성들과의 인터뷰에 따르면 대부분의 여성들이 중국에서 한 차례, 많게는 수차례에 걸쳐 인신매매, 강제결혼 당한 것으로 확인됨

- 이들은 초기에는 자발적으로 월경하였으나, 이후 다수는 무의식 또는 강제적 인신매매, 조직적 인신매매의 대상이 되었음

2002년 입국한 새터민 000은 1998년부터 20여명의 북한인을 중국으로 보내주었다고 한다. "조선족의 요구로 1인당 4천 위안정도(21세 정도는 6천, 30세 넘으면 3-4천 위안)를 받고 중국으로 보냈다. 당시 북한에서는 자발적으로 중국으로 시집보내달라는 여성들이 매우 많았다. 우리가 4천 위안 정도에 넘기면 한족들은 1만 위안 정도에 되팔곤 했다"는 것이다.(위의 책 p280)

○ 노동착취

- 신분적 불안으로 탈북자들은 대부분 강제노동, 노동착취, 임금체불, 성매매, 아동노동 등 온갖 형태의 노동착취에 내몰리고 있음

○ 가정 파괴 및 각종 인명 사고

- 강제결혼, 인신매매, 강제복송, 남한 행, 북한의 연좌제 처벌 등으로 대부분의 탈북자들이 가정 파괴, 이산의 아픔을 겪고 있음
- 또한 탈출과정에 악어에 먹히거나 실종되는 등 수많은 인명 사고들도 일어나고 있음

□ 지역협력 방안

○ 난민지위 부여를 위한 협력

- 난민의 지위를 부여해야 하는 이유는 우선 탈북자들을 포함해 북한주민들은 모두 이미 북한 내에서 가장 가혹한 정치적, 사회적, 종교적 박해의 대상이며, 탈북자들은 강제복송 될 경우 이런 박해에 더 엄중히 노출되고 있으며 또 장기적으로 제도적이고 체계적인 박해와 차별을 받아야 함
- 따라서 이들은 1951년 난민의 지위에 관한 협약과 1967년 보안협약에 따라 난민의 지위에 분명히 부합함
- 다음의 이유는 이들이 겪는 경제적 궁핍의 원인이 온갖 정치적, 사회적, 종교적 박해를 감행하는 북한의 정치, 경제 시스템, 당국의 경제정책에 기인하고 있기 때문임
- 또한 이들은 대부분 ‘현지 체제 중 난민’의 지위에도 부합하기 때문, 유엔난민고등사무소(UNHCR)에 의해 정의된 ‘현지 체제 중 난민’이란 탈북 당시 난민이 아니었을지라도 “이후” 복송 후 타당한 박해의 두려움을 가지는 자를 의미함

○ 보편적 인권보호에 대한 국제적 협조

- 국제인권규약 B규약, 제12조 제2항, “모든 사람은 자국을 포함하여 어떠한 나라로부터도 자유로이 퇴거할 수 있다.”
- 국제이주기구(International Organization for Migration: IOM)에 따르면 불법이주자(Undocumented Migrants)라 할지라도 생명권, 노예 및 강제노동금지, 고문 및

- 비인도적인 처우금지, 사생활 보호권, 이동의 자유, 사상 및 종교의 자유, 표현의 자유 등 기본적인 인권을 침해당하지 않을 권리를 갖고 있음
- 상기의 국제적 협약, 가치에 따라 국제적 협조 확대가능
- 암묵적 탈북자 구출
- 대부분의 나라들이 탈북자들을 암묵적으로 구출, 도와주고 있음
 - 중국을 벗어난 탈북자들은 동남아시아 또는 몽골을 거쳐 한국행 실현, 태국 등 나
라들은 자국에 불법 입국한 탈북자들을 인도적 차원에서 북한으로 추방하지 않고
한국을 비롯해 그들이 원하는 국가로의 정착을 허용하고 있음
- 지역의 제도적 협조
- 베트남 난민, 보트피플에 대한 구조 사례 참조
 - 중국정부가 지금까지 베트남 난민 또는 다른 나라의 난민을 중국사회에 통합시키
거나 다른 곳에 정착하도록 유엔난민고등기구와 협조해 온 사례 참조
 - 대량탈북, 북한붕괴 대비 비상 난민캠프 기획 및 협조 //끝//